

Policy Brief

Membangun Pengawasan Tematik yang Adaptif di Pemerintah Daerah: Penerapan Model ADAPT di Kabupaten Bolaang Mongondow

Rio A. Lombone

Inspektur Daerah, Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditujukan kepada:

1. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow

A. Ringkasan Eksekutif

Pengawasan tematik oleh Inspektorat Daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan pencapaian program prioritas. Namun, di Kabupaten Bolaang Mongondow, pengawasan ini masih menghadapi tantangan dari segi relevansi, efektivitas, dan adaptivitas. Untuk menjawab hal tersebut, model **ADAPT (Adaptive Thematic Supervision Model)** diusulkan sebagai pendekatan inovatif yang mampu memperkuat kapasitas pengawasan tematik berbasis data, partisipasi, kolaborasi, dan teknologi. Policy brief ini menyajikan permasalahan, alternatif solusi, dan rekomendasi penerapan ADAPT secara sistematis.

B. Pendahuluan

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pengawasan memegang peran sentral sebagai mekanisme kontrol, evaluasi, dan perbaikan kebijakan publik. Salah satu pendekatan yang semakin ditekankan dalam beberapa tahun terakhir adalah **pengawasan tematik**, yakni pengawasan yang difokuskan pada isu-isu strategis dan program prioritas nasional maupun daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, pengawasan tematik telah mulai dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi pelaksanaan program pembangunan, terutama yang menyangkut penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Namun dalam implementasinya, pengawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Penetapan tema pengawasan cenderung tidak berdasarkan analisis risiko atau kebutuhan kontekstual. Fokusnya lebih pada aspek administratif dibanding evaluasi capaian substansi program.

Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, sementara keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengawasan relatif

rendah. Hasil pengawasan pun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau perbaikan program. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam proses monitoring dan pelaporan pengawasan secara cepat dan akurat.

Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam policy brief ini adalah Model **ADAPT (Adaptive Thematic Supervision Model)**, yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pengawasan melalui lima pilar utama: agenda partisipatif, pemetaan risiko berbasis data, audit berbasis solusi, kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, serta digitalisasi pengawasan.

C. Permasalahan

1. Keterbatasan dalam penetapan agenda pengawasan yang belum partisipatif dan tidak selaras dengan isu prioritas pembangunan.
2. Minimnya pemanfaatan data dan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan.
3. Kelemahan dalam tindak lanjut temuan serta kurangnya kolaborasi lintas sektor dan antar lembaga pengawasan.
4. Fokus pengawasan cenderung administratif, belum berorientasi pada evaluasi dampak kebijakan atau kinerja program tematik.

D. Alternatif Solusi

1. Penerapan Model ADAPT, yang terdiri atas:
 - *Agenda Setting Partisipatif*: menyusun fokus pengawasan secara inklusif.
 - *Data-Driven Risk Mapping*: identifikasi risiko berbasis data sektoral.
 - *Action-Oriented Audit*: audit kinerja yang memberikan solusi.
 - *Partnership and Learning Loop*: kolaborasi dan siklus pembelajaran.
 - *Technology-Enabled Monitoring*: digitalisasi sistem pengawasan.
2. Penguatan kapasitas Inspektorat, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dan metodologi audit berbasis risiko.
3. Membangun regulasi daerah yang mendorong integrasi pengawasan dengan siklus perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan.

E. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah daerah perlu mengadopsi Model ADAPT secara bertahap, dimulai dengan pilot project pada pengawasan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan.
2. Inspektorat Daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan Bappeda, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyusun agenda dan menindaklanjuti hasil pengawasan.
3. Diperlukan investasi pada sistem informasi pengawasan, termasuk pelatihan SDM dan pengembangan dashboard tematik berbasis digital.
4. Evaluasi berkala atas efektivitas pengawasan tematik perlu dilakukan untuk memastikan siklus pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, D.S. (2021). *Audit Tematik dan Percepatan Reformasi*. Jakarta: BPKP.
- Svava, J.H. (2022). *Adaptive Governance in Local Government Settings*. *Public Administration Review*, 82(3), 512–526.
- Permendagri No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- BPKP (2023). *Panduan Pengawasan Tematik dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah*.
- UNDP Indonesia (2021). *Strengthening Local Accountability through Innovative Oversight Models*.